

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian studi analisis isi mengenai opini *public figure* Yogyakarta tentang mekanisme kepemimpinan DIY. Hal-hal tersebut antara lain: deskripsi mengenai rubrik Aspirasi Keistimewaan, deskripsi tentang kutipan langsung dalam berita rubrik Aspirasi Keistimewaan serta gambaran media tepat rubrik Aspirasi Keistimewaan diterbitkan, dalam hal ini adalah *SKH Kedaulatan Rakyat*.

A. Rubrik Aspirasi Keistimewaan

Sebagai suatu lembaga yang dikelola secara bisnis, perusahaan penerbitan pers, juga menghasilkan produk yang dijual pada masyarakat. Berbeda dengan produk barang lainnya, produk penerbitan pers mempunyai misi tersendiri, yaitu ikut mencerdaskan masyarakat (fungsi edukasi). Itulah sebabnya, produk penerbitan pers terikat dengan misinya itu dan tidak boleh dikelola dengan sembarangan. Produk tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana pers tersebut melaksanakan operasinya.

Berita adalah salah satu produk atau isi dari penerbitan pers selain pandangan (opini) masyarakat dan periklanan. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa.

Berdasarkan pengertian tersebut maka isi dari rubrik Aspirasi Keistimewaan juga dapat dikategorikan sebagai sebuah berita. Jika pada

umumnya yang menjadi isi atau informasi dari sebuah berita adalah laporan sebuah peristiwa maka hal berbeda yang terjadi pada rubrik Aspirasi Keistimewaan *SKH Kedaulatan Rakyat*. Isi dari rubrik tersebut adalah pendapat atau opini narasumber yakni *public figure* Yogyakarta terkait mekanisme kepemimpinan DIY yang merupakan salah satu penyebab belum terselesaikannya undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan Yogyakarta (RUUK Yogyakarta).

Terdapat berbagai bentuk berita dalam dunia jurnalistik, salah satunya adalah *straight news* yang merupakan berita penting yang harus segera disampaikan kepada publik. *Straight news* adalah bentuk berita yang terdapat dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan *KR*. Narasumber dalam berita tersebut sudah ditetapkan dan merupakan *publik figure* atau tokoh yang memiliki banyak massa di Yogyakarta. Penyebutan *straight news* sebagai bentuk berita dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan juga dibenarkan oleh redaktur senior sekaligus penggagas rubrik Aspirasi Keistimewaan *KR* Ronny Sugiarto pada wawancara 23 Juni 2011 berikut:

Bentuk beritanya adalah *straight news* dengan wawancara khusus. Ini bukan *event* tapi berita adalah hasil wawancara khusus. Wawancara khusus tapi ditampilkan dalam rubrik. Rubrik yang diadakan secara tematis. Mengikuti kebutuhannya. (Sumber: Hasil Wawancara)

Dalam sebuah surat kabar umumnya terdapat beberapa rubrik. Rubrik adalah ruangan pada halaman surat kabar, majalah atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat; misalnya rubrik wanita, rubrik olahraga, rubrik pendapat pembaca dan sebagainya. Demikian halnya dengan rubrik Aspirasi Keistimewaan. Rubrik tersebut setiap

penerbitannya hanya menampilkan 1 (satu) berita yang khusus memuat opini narasumber yakni *public figure* Yogyakarta terkait permasalahan keistimewaan DIY. Tidak terdapat berita yang berisi informasi lain dalam pemuatan rubrik Aspirasi Keistimewaan.

Rubrik dapat dibagi menjadi dua bagian yakni rubrik tetap dan rubrik tidak tetap. Rubrik Aspirasi keistimewaan adalah contoh rubrik tidak tetap dalam *SKH Kedaulatan Rakyat*. Hal ini karena meskipun rubrik Aspirasi Keistimewaan berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu dari perusahaan tetapi jika hanya disampaikan secara situasional (momentum) maka disebut sebagai rubrik tidak tetap.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu redaktur *KR* yakni Ronny Sugiantoro pada 23 Juni 2011, ia mengungkapkan bahwa rubrik ini hanya bersifat momentum, bukan rubrik tetap.

Semuanya sesuai momentum aja. Tapi untuk khusus kolom ini tidak menutup kemungkinan bsok masih ada lagi. Kolom ini juga tidak rutin terbit setiap hari dalam selang waktu dua bulan karena dipengaruhi oleh masalah teknis. (Sumber: Hasil Wawancara)

Hal ini memperjelas alasan diadakannya rubrik ini juga tidak terlepas dari ramainya pembicaraan mengenai keistimewaan DIY saat itu. Ronny Sugiantoro juga mengemukakan bahwa kehadiran rubrik Aspirasi Keistimewaan yang memuat berita tentang opini narasumber mengenai keistimewaan DIY juga digunakan *KR* sebagai strategi dalam mewujudkan misi tertentunya yakni “mengegolkan” penetapan.

Rubrik Aspirasi Keistimewaan resmi diterbitkan pada 15 Januari-12 Maret 2011, dan ditempatkan secara bergantian pada halaman *Kota Yogya, Lingkar*

Yogya, dan *DIY*. Berpatokan pada nama rubrik yakni Aspirasi Keistimewaan maka dapat dipastikan bahwa sesuatu yang dibahas dalam rubrik tersebut tidaklah jauh dari tema tentang keistimewaan DIY.

Ronny Sugiantoro selaku redaktur *KR* juga mengemukakan bahwa latar belakang pembuatan rubrik Aspirasi Keistimewaan tidak terlepas dari peran *KR* sebagai koran lokal Yogyakarta yang memiliki tanggung jawab untuk menjadikan permasalahan keistimewaan DIY menjadi sebuah isu penting yang harus diketahui seluruh masyarakat DIY. Seperti yang dikemukakan Ronny berikut ini:

Jadi kita punya ide kita sebagai orang jogja, harus punya tanggungjawab untuk mengangkat masalah keistimewaan sebagai isu yang penting. Mungkin koran lain menganggap gak penting, ya gak apa-apa. Walaupun sama-sama koran jogja. Jadi tidak harus mengikuti koran lain. (Sumber: Hasil Wawancara)

Proses produksi rubrik Aspirasi Keistimewaan sama dengan proses produksi rubrik lainnya di *KR*. Pertama-tama dibentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa orang yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan wawancara, melakukan penulisan berita, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas rubrik tersebut. Tim tersebut terdiri dari 1 (satu) pengampu/redaktur dan 5 (lima) orang reporter berita. Kelima reporter tersebut akan ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dalam rapat redaksi yang dilakukan setiap hari pada jam 7 malam.

Setelah ditentukan pihak yang menjadi narasumber, pengampu rubrik yakni Primaswolo Sujono kemudian menunjuk salah seorang dalam tim untuk ditugaskan melakukan wawancara. Setiap reporter yang ditunjuk untuk melakukan wawancara akan dibekali dengan beberapa pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin diperoleh dari narasumber. Hasil wawancara tersebut kemudian

dituliskan oleh reporter bersangkutan dalam bentuk berita opini. Bentuknya hampir sama dengan bentuk berita pada umumnya, yakni mengandung elemen 5W+1H hanya saja yang ditampilkan adalah khusus pendapat narasumber tentang keistimewaan DIY, khususnya tentang mekanisme kepemimpinannya.

Dalam berita opini rubrik Aspirasi Keistimewaan, pemberian judul dilakukan oleh pengampu dalam hal ini Primaswolo Sujono. Reporter hanya berhak mengusulkan judul namun yang menentukan adalah pengampu berita. Namun, pada bagian isi berita, pengampu tidak berhak melakukan perubahan apapun yang terkait makna. Pengampu hanya bisa melakukan pengeditan untuk memperbaiki penulisan kata atau bahasa tanpa merubah maksud dari isi berita.

Narasumber yang ditampilkan dalam berita opini pada rubrik Aspirasi Keistimewaan merupakan narasumber yang telah melewati kualifikasi tertentu oleh KR. Narasumber yang dipilih adalah tokoh masyarakat (*public figure*) misalnya pengacara, pengusaha, ketua paguyuban yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan keistimewaan DIY. Hal ini dilakukan KR untuk mewujudkan misi penerbitan rubrik yakni menggolkan penetapan kepala daerah Yogyakarta, tempat media ini berada.

B. Kutipan Langsung dalam Rubrik Aspirasi Keistimewaan

Salah satu bagian pokok yang terdapat dalam sebuah artikel berita adalah keberadaan kutipan pendapat dari sumber berita. Seperti halnya dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan juga terdapat kutipan langsung pendapat narasumber yang sengaja diselipkan oleh penulis untuk menunjukkan bahwa apa yang disajikan

dalam artikel berita tersebut benar-benar merupakan data yang diperoleh dari narasumber dan bukan hasil karangan penulis.

Kehadiran kutipan pendapat dalam sebuah artikel berita menambah bumbu dalam berita (Ishwara, 2005:132). Selain itu, kutipan langsung dalam sebuah artikel berita akan menunjukkan keobjektifan sebuah berita yang disajikan sehingga akan memperkuat kepercayaan pembaca terhadap isu yang sedang dibahas.

Berikut beberapa contoh kutipan langsung yang terdapat dalam setiap artikel rubrik Aspirasi Keistimewaan periode 15 Januari sampai 12 Maret 2011:

TABEL 4
Opini Narasumber dalam Kutipan Langsung Rubrik Aspirasi Keistimewaan
(Periode 15 Januari-12 Maret 2011)

Tgl	Narasumber	Kutipan Langsung
15 Jan 2011	M. Ariesman HS	<p>“Bila dalam RUUK itu, gubernur dan wakil gubernur tidak ditetapkan maka keistimewaan itu semu.”</p> <p>“Mereka besar di Jogja, makan juga di sini, kok tidak mendukung, bahkan justru memprovokasi, itu yang saya heran.”</p> <p>“Saya kira demokrasi yang diartikan pemerintah pusat bukan suara rakyat, tetapi suara penguasa.”</p>
16 Jan 2011	Prof Dr Wuryadi	<p>“Model penetapan seperti yang selama ini selalu disuarakan oleh masyarakat DIY jauh lebih baik dibanding dengan model pemilihan langsung. Sebab selain model penetapan ini sudah dilandasi dengan kesepakatan dari masyarakat DIY juga mencerminkan demokrasi Pancasila seperti yang sudah dicontohkan oleh Presiden Soekarno.”</p> <p>“Kalau mau setia pada Pancasila dan menghargai pengorbanan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, model penetapan saya kira adalah model yang paling tepat, Sebab kalau sampai menggunakan model pemilihan langsung tanpa disadari mereka telah mengacu pada demokrasi liberal.”</p>
18 Jan 2011	Prof Dr Djohar MS	<p>“Saya kira dalam persoalan ini tidak hanya sekedar berbicara demokratis atau tidak. Apalagi jasa Sri Sultan HB sebagai raja di Kraton terhadap keberadaan NKRI sangat hebat dan tidak bisa ditiru oleh daerah lain. Untuk itu, penetapan sampai saat ini menjadi pilihan tepat yang tidak bisa ditawarkan lagi.”</p> <p>“Mungkin untuk persoalan budaya daerah lain bisa meniru, tetapi untuk sejarah dan hukum tidak akan ada yang bisa menyamai keistimewaan yang dimiliki DIY”.</p>
20 Jan 2011	Drs. M Ma’ruf Msi	<p>“Secara ekonomi, Yogyakarta menarik bagi investor karena figur Sultan HB X. Mereka menilai Yogyakarta memiliki jaminan keamanan bagi investasinya, sebabnya karena figur Sultan yang berkuasa”.</p>

		<p>“Yogyakarta itu unik dari berbagai sisi. Sehingga pemerintah pusat jangan memaksakan. Justru seharusnya itu menjadi potensi kebhinekaan yang tidak ternilai bagi Indonesia.”</p>
21 Jan 2011	Joko Wintolo	<p>“Keliru kalau menganggap kekuasaan Kraton Yogyakarta itu feodal, sejak HB IX hubungan Kraton dan rakyatnya adalah hubungan dekat yang biasa. Ketika Sultan lewat di jalan, tidak ada penghormatan yang berlebihan dari masyarakat, semua berjalan wajar. Itu menunjukkan Kraton Yogyakarta tidak feodal”.</p> <p>“Tidak boleh dilupakan, setiap terjadi konflik horisontal, Kraton Yogyakarta mendamaikan. Sehingga orang-orang dari luar Jawa juga merasakan bukti keistimewaan Yogyakarta.”</p>
23 Jan 2011	Drs Purnawan Hardiyanto MEd Dev	<p>“Masyarakat Jogja menilai kalau Sultan dan Paku Alam yang sekarang itu selalu prorakyat, sehingga kalau figur mereka menghadapi persoalan atau tekanan, rakyat akan membela mati-matian.”</p> <p>“Masyarakat Yogya tidak dilibatkan dalam penyusunan RUUK. Jadi tidak heran kalau perlawanan dilakukan rakyat karena arogansi pemerintah pusat.”</p> <p>“Masyarakat Yogya gelisah, selama ini sudah santun dalam melakukan aksinya. Kalau pemerintah tetap memaksakan kehendak maka bisa terjadi kebuntuan politik.”</p> <p>“Ini juga pesan bagi siapapun yang menjadi Sultan maupun Paku Alam di masa depan agar tidak meninggalkan rakyat.”</p>
24 Jan 2011	M Fikron Washly Arifudin	<p>“Salah satu model sosial dari keistimewaan Yogya dalah sifat ‘feodal’. Maksudnya adalah adanya sifat kepatuhan, rasa hormat terhadap Kraton Yogyakarta maupun Pakualaman.”</p> <p>“Sebagian masyarakat Yogyakarta pro penetapan, hal itu bisa dibaca sebagai ungkapan rasa hormat masyarakat Yogyakarta terhadap Kraton Yogyakarta dan Pakualaman.”</p> <p>“Di Thailand dimana Raja menjadi simbol, sementara pelaksanaan pemerintahan dilakukan perdana menteri kemungkinan terjadi gejolak sangat besar. Namun jika posisi Sultan ada di eksekutif maka potensi terjadi gejolak relatif kecil, karena kebijakan politik yang dirumuskan relatif dipatuhi rakyat.”</p>
25 Jan 2011	Sulistyo	<p>“Keistimewaan DIY pada dasarnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang melekat pada Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX. Bila poin itu tidak masuk dalam draf, semua tidak ada artinya.”</p> <p>“Apakah bila Gubernur DIY selain Sultan akan bisa lebih baik, belum tentu, apakah kesejahteraan juga akan tercapai . Bila dari Kraton saja sudah baik dan rakyat menginginkan kenapa tidak.”</p> <p>“Biaya pemilihan kepala daerah tidak sedikit. Lebih baik biaya itu dialihkan untuk pengentasan kemiskinan.”</p>
26 Jan 2011	Said Tuhuleley	<p>“Sebetulnya keinginan pemerintah pusat untuk menegakkan prinsip demokrasi tidak salah, tinggal bagaimana mengkompromikan dengan rakyat DIY.</p> <p>“Warisan sejarah yang merupakan hasil kesepakatan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan presiden Soekarno harus terus dipelihara. Soal formula yang tepat itu seperti apa, DPR harus bisa mencari solusi yang terbaik”.</p>
27 Jan 2011	Prof (Emr) Adhi Susanto MSc PhD	<p>“Menerapkan sistem demokrasi boleh-boleh saja, asalkan tetap mengedepankan keistimewaan yang sudah dimiliki oleh DIY. Hal itu penting karena sistem pemilihan langsung seperti yang dilakukan oleh sejumlah daerah di Indonesia ternyata juga memiliki kekurangan.”</p>

28 Jan 2011	Dr Ir Sunarto Goenadi DAA	<p><i>“Rembuge piye to? Keistimewaan DIY itu apa saja, penetapan hanya salah satunya. Jangan sampai unsur keistimewaan lain justru dilupakan.”</i></p> <p>“Mereka sangat menghargai sejarah, sementara kita lebih mencari siapa yang salah. Sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan keistimewaan DIY banyak yang bisa menjadi ilustrasi.”</p>
30 Jan 2011	Prof Ir Sukandarrumi di MSc PhD	<p>“Saya kira wajar jika DIY mendapatkan predikat sebagai daerah istimewa. Keistimewaan itu tidak hanya terletak pada jabatan gubernur dan wakil gubernurnya, tapi juga dari aspek pendidikan dan budaya. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah pusat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi rakyat DIY.”</p> <p>“Meski pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya menggunakan model penetapan kondisi DIY selalu tenang dan kondusif. Saya kira kalau kondisi daerahnya sudah tenang jangan <i>diutak-atik</i> lagi, soalnya bisa menimbulkan problem baru dalam masyarakat.”</p> <p>“Pemerintah tidak perlu khawatir karena di dalam Kraton sebetulnya sudah ada semacam <i>paugeran</i> yang mengatur tentang jabatan Sultan. Termasuk jika Sultan sudah berusia lanjut atau masih dibawah umur.”</p>
31 Jan 2011	Prof Dr Ir Djoko Prajitno MSc	<p>“Demokrasi itu bukan berarti segala sesuatunya harus seragam. Untuk itu bila budaya masyarakatnya menghendaki penetapan, hendaknya diikuti saja. Apalagi selama ini Indonesia menganut asas Bhineka Tunggal Ika.”</p>
01 Feb 2011	Purwantaka	<p>“Yogyakarta itu yang mengasuh NKRI ketika awal Yogyakarta itu yang mengasuh NKRI ketika awal berdiri, ibaratnya Yogyakarta itu orang tua. Kalau melupakan sejarah Yogya berarti sama dengan melupakan jasa orang tuanya sendiri.”</p> <p>“Pihak yang tidak setuju dengan penetapan, terutama yang ada di pemerintahan pusat silakan datang ke Yogyakarta. Tanyakan kepada masyarakat Yogyakarta apa yang diinginkan dengan keistimewaan Yogyakarta.”</p>
02 Feb 2011	Anggi Minarni	<p>“Yogyakarta selama ini terbukti mampu merawat keberagaman yang ada dalam semangat kesatuan. Demokrasi bukanlah sesuatu yang jelek. Tapi Yogyakarta memiliki demokrasi versi tersendiri dalam memilih pemimpinnya.”</p>
04 Feb 2011	Harry Setyo	<p>“Kenyamanan komunitas Tionghoa di Yogyakarta, tidak lepas dari keberadaan Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman.”</p> <p>“Bahkan terjadi akulturasi yang justru semakin memperkuat Yogya sebagai pusat budaya.”</p> <p>“Tahun 1998 saat daerah lain bergejolak dan etnis Tionghoa Tertekan dan terancam. Di Yogyakarta kami merasa aman.”</p>
05 Feb 2011	Mohammad Jazir ASP	<p>“Demokrasi berdasarkan pancasila adalah musyawarah mufakat maka kalau perwakilan rakyat sudah menghendaki penetapan, saya kira pemerintah pusat tinggal melakukan musyawarah.”</p> <p>“Rakyat sudah merasakan model pemerintahan yang baik maka tidak sepatutnya diubah dengan sesuatu yang belum jelas kebaikannya. Tidak boleh nasib rakyat dipertaruhkan untuk sesuatu yang belum tentu jelas baik buruknya.”</p>
06 Feb 2011	Slamet Santoso	<p>“Saya khawatir seandainya pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY menggunakan model pemilihan langsung justru nantinya akan mengurangi arti keistimewaan yang sudah ada. Apalagi model penetapan tersebut sudah digunakan secara turun-temurun dan berjalan cukup baik.”</p> <p>“Sementara ini model penetapan jauh lebih baik. Pasalnya jika menggunakan model pemilihan langsung sudah menghabiskan dana cukup banyak, calon yang dihasilkan belum tentu baik dan berpihak</p>

		<p>pada rakyat.”</p> <p>“Sebagai perwakilan dari pedagang kaki lima saya berharap agar pemerintah pusat mengerti apa yang dikehendaki oleh rakyat DIY. Sebab apa yang menurut pusat baik belum tentu pas untuk rakyat DIY.</p>
07 Feb 2011	Suraji	<p>“Saya kira pemerintah perlu belajar dari kasus di banyak daerah di Indonesia dan negara-negara lain jangan sekali-kali memaksakan kehendak kepada rakyat.”</p> <p>“Selatanya pemerintah untuk segera mengikuti kehendak rakyat Yogyakarta yaitu penetapan bukan pemilihan.”</p>
09 Feb 2011	Rudiarto	<p>“Dalam penentuan jabatan, Kraton selalu menggunakan kriteria tertentu jadi tidak sekadar menunjuk. Karena sosok seorang Sultan tidak sekadar menjadi gubernur, tetapi juga harus bisa menjadi pengayom masyarakat. Saya kira baik Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun X sudah melaksanakan tahta untuk rakyat itu dengan baik.”</p> <p>“Saya kira sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan pada masyarakat DIY untuk menentukan model dalam pemilihan gubernur bagi daerahnya sendiri. Oleh karena itu, apabila sebagian besar masyarakatnya menghendaki adanya penetapan karena dinilai lebih efektif, tidak ada salahnya jika aspirasi tersebut diakomodir.”</p>
10 Feb 2011	Rustam Fatoni SPd	<p>“Semua sudah jelas, rakyat Yogya menghendaki penetapan, artinya disitu memang sudah ada proses demokrasi.”</p> <p>“Siapa saja yang mempermasalahkan Keistimewaan Yogya. Karena tidak memahami substansinya.”</p>
11 Feb 2011	Dr ir Heru Hendrayana	<p>“Selama lebih dari 30 tahun tinggal di Yogyakarta, rasa nyaman dan aman sangat saya rasakan. Secara pribadi saya melihat ini karena sosok Sultan dan Paku Alam.”</p> <p>“Yogya itu sudah aman, jangan di otak-atik. Ada banyak hal lain yang seharusnya dilakukan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.”</p> <p>“Kalau dipaksakan pemilihan, saya yakin hal itu sulit dijalankan. Pemerintah pusat janganlah memaksakan, sistem di Yogya itu sudah demokratis dengan caranya sendiri.”</p>
12 Feb 2011	Prof Dwikorita Karnawati MSc PhD	<p>“Yogyakarta memiliki model demokrasi sendiri yang mengedepankan nilai-nilai lokal, pemerintah pusat seharusnya jangan memaksakan diri. Kondisi Yogyakarta selama ini nyaman dan aman”</p> <p>“Peran Yogyakarta untuk NKRI tidak boleh dilupakan. Itu menjadi modal sejarah yang juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat.”</p>
14 Feb 2011	Deddy Pranowo Eryono	<p>“Kalau melihat sejarah panjang Yogyakarta sejak berdiri, bergabung dengan NKRI hingga sekarang, penetapan adalah pilihan satu-satunya.”</p> <p>“Kita harus menghormatisistem di Kraton Yogyakarta karena itu juga merupakan sistem demokrasi. Itu juga salah satu keistimewaan DIY dalam hal budaya.”</p> <p>“Begitupula dengan pemerintah pusat, mereka harus melihat sejarah panjang Yogyakarta. Sehingga bisa memberikan keputusan tepat agar ada penetapan.”</p> <p>“Yogyakarta itu daerah budaya juga wisata, seharusnya pemerintah jangan membuat Yogya keruh, tapi justru bagaimana menjadikan keistimewaan Yogya untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.”</p>
16 Feb 2011	Marjuki	<p>“Menengok sejarah, ijab kabul yang dilakuakn oleh Sulatan HB IX dan paku Alam VIII merupakan jiwa besar dari keduanya untuk bergabung dengan NKRI. Tidak ada negarawan saat ini yang</p>

		menyamai keduanya.” Hal itu menunjukkan demokrasi sudah tumbuh di Yogyakarta ketika NKRI belum berdiri. Bahkan keberadaan asosiasi badan permusyawaratan desa dibidani di DIY.”
17 Feb 2011	Drg Ahmad Syaify SpPerio (K)	“Esensi keistimewaan adalah sultan itu gubernur, titik” “Dan itu tidak boleh terjadi, no way” “Jadi kuncinya adalah pegang teguh prinsip dan fokus, jangan mau dibelokkan atau dipecah belah,”
18 Feb 2011	Julius F Tualaka	“Pendukung Sultan berasal dari berbagai kalangan. Jika Sultan Menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari aktivitas partai politik maka itu akan memberi energi lebih bagi masyarakat yang mendukungnya.” “Sultan HB X harus menyatakan kalau Nasdem tidak akan menjadi parpol, itu akan membuat kami semakin bersemangat untuk memperjuangkan penetapan.” “Kekuatan itu tidak dimiliki oleh pemimpin lain. Sultan akan semakin dicintai rakyatnya.”
19 Feb 2011	Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA	“Memaksakan pemilihan itu sama saja dengan cobaan. Pemerintah Pusat harusnya sudah tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Yogyakarta terkait keistimewaan Yogya.” “Maklumat 5 September menunjukkan kebesaran jiwa dari pimpinan Yogyakarta saat itu. Presiden Soekarno juga memberikan pengakuan dengan menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang setingkat Provinsi. Pemahaman yang ada selama ini justru sebaliknya, Yogyakarta sebagai provinsi..”
21 Feb 2011	Prof Dr Ir Sunjoto Dip HE, DEA	“Saya kira model penetapan yang digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY sudah baik, jadi tidak perlu diusik lagi. Sebab kalau dipaksakan saya khawatir justru akan menimbulkan problem baru.” Masyarakat saat ini semakin cerdas, jadi tidak mudah ditipu. Apalagi jika isu tersebut sengaja diciptakan untuk mengalihkan isu yang lebih besar saya kira kurang tepat.” “Saya kira pemerintah perlu berkaca dari berbagai persoalan yang ada dan lebih cermat dalam mengambil keputusan. Jangan sampai masyarakat DIY marah dan menghunuskan keris untuk mempertahankan pendapat yang mereka yakini benar”
22 Feb 2011	Djoko Santoso	“Kalau berpegang pada Pancasila mestinya yang dijunjung tinggi adalah musyawarah mufakat.” “Saya kira rakyat DIY tidak akan mudah diadu domba, karena mereka tidak hanya kritis tapi juga cerdas dalam menyikapi sesuatu hal. Walaupun begitu akan lebih baik jika aspirasi masyarakat DIY tetap dipertimbangkan.
23 Feb 2011	Prof Dr Ir Tri Yuwanta SU DEA	“Penetapan bagi saya adalah bagian demokrasi yang paling halus, kualitas calon sudah diketahui sehingga tinggal ditetapkan saja. Itu cocok untuk DIY sekarang ini.”
24 Feb 2011	Taufik Ridwan	“Yogyakarta sudah menjadi brand yang istimewa di Indonesia bahkan dunia. Namun setelah nantinya penetapan, Sultan perlu mensinergikan keistimewaan-keistimewaan di Yogya.” “Ribuan anak muda setiap tahunnya kuliah di Yogya. Kalau bisa jangan sampai mereka datang ke yogya karena ‘tradisi’ keluarga atau tetangganya yang kuliah di Yogya. Namun karena Yogya memang memiliki kualitas dalam pendidikannya.”
25 Feb 2011	Edwin Himna	“Keberadaan raja di Yogya, termasuk Kraton Yogya itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Bahkan wisman juga tertarik dengan sejarah Yogyakarta, dari masa kerajaan hingga bergabung dengan NKRI.”

		“Kalau pemerintah memaksakan pemilihan, yang terjadi justru bisa mengurangi nilai sejarah Yogyakarta sendiri.”
26 Feb 2011	Prof Didit Welly Udjiyanto	“Sebagai warga Yogya, melihat sejarah yang ada keistimewaan Yogya memang harus diwujudkan dalam bentuk penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur i DIY.” “Selama ini di DIY tidak pernah terjadi seperti daerah lain seperti kerusuhan. Pemerintah Pusat harusnya melihat ini.”
27 Feb 2011	Widyawan ST MSc PhD	“Saya kira Pemerintah Pusat harus segera mengambil keputusan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY dan segera dikomunikasikan dengan rakyat. Tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut pihak-pihak yang terkait harus berkepal dingin dan mengedepankan keamanan serta kepentingan rakyat.” “Seandainya, semua pihak menyetujui adanya penetapan, alangkah baiknya apabila didalamnya juga diatur beberapa hal. Misalnya bagaimana kalau Sultan sudah terlalu tua dan tidak sanggup untuk memerintah atau justru sebaliknya jika usia Sultan masih kecil.” “Saya kira dalam menyikapi persoalan ini masyarakat DIY tidak perlu turun ke jalan, karena aspirasi mereka bisa disalurkan lewat DPRD atau DPD.”
28 Feb 2011	Drg Eddy Purjanto	“Soal sejarah kami sepakat, bahwa memang harus penetapan. Mewakili dunia usaha yang ada di Yogyakarta, saya mengatakan bahwa iklim usaha di Yogyakarta sangat kondusif. Tidak ada kebijakan yang selalu berubah, seperti misalnya daerah lain yang ganti pemimpin ganti kebijakan.” “Tahun 80-an ketika di Solo membara karena kerusuhan bersifat rasis, daerah sekitarnya ikut rusuh sementara Yogyakarta adem ayem. Hal itu salah satunya karena peran Sultan HB IX. Begitupula tahun 1998 ketika terjadi reformasi Yogyakarta aman meski daerah lain membara.”
02 Mar 2011	Fransisca Diwati	“Sebagai warga Yogyakarta, tentu saja dengan tekad bulat saya mendukung penetapan.” “Pemerintah Pusat mungkin sudah memiliki alasan terkait keputusannya, tapi juga harus melihat aspirasi yang ada. Harus didengar rakyat Yogya ingin seperti apa.”
03 Mar 2011	Susilo ‘Den Baguse Ngarso’	“Terus terang, secara pribadi sebagai warga Yogya saya setuju Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan penetapan. Bahkan saya juga gelisah persoalan keistimewaan DIY pembahasan di Jakarta yang hasil-hasilnya masih ngambang.”
06 Mar 2011	Istidjab Danunegoro	“Kalau melihat sejarah kan sudah pasti penetapan. Namun di luar itu, suasana Yogya yang kondusif akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Yogya.” “Yang kita jual ke wisatawan salah satunya ya keistimewaan Kraton Yogyakarta.”
07 Mar 2011	Dr Bambang Supriyadi CES DEA	“Demokrasi harus mengedepankan aspirasi dan kehendak rakyat, karena dengan cara itu diharapkan bisa tercapai kata mufakat. Seandainya kata mufakat tidak tercapai baru menggunakan voting yang berdasarkan pada suara terbanyak. Jadi kalau masyarakat DIY sepakat untuk menggunakan penetapan saya kira tidak perlu ada pemilihan langsung.” “Selama ini meski menggunakan model penetapan tapi kondisi di DIY cukup kondusif, karena ide itu muncul atas kesepakatan bersama. Oleh karena itu kalau model penetapan dinilai paling tepat bagi DIY, pemerintah pusat tidak perlu memaksakan.”

08 Mar 2011	KPH H Setyohardjo Dirjonagoro SH	<p>“Saya melihatnya pemerintah pusat tidak tahu komitmen negara di masa lalu terhadap keistimewaan Yogyakarta. Yogya memiliki amanah dan hak-hak sejarah yang kuat.”</p> <p>“Tanah-tanah SG maupun PAG sebagian besar telah diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Sultan HB X maupun sultan HB IX yaitu ‘Tahta Untuk rakyat’.”</p>
09 Mar 2011	Tuti Fachruddin	<p>“Bagaimanapun secara psikologi akan lebih menentramkan para pengusaha yang sebagian besar warga asli DIY jika segera ada kepastian tentang penetapan. Oleh karena itu pemerintah pusat jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan pemilihan langsung. Karena dalam suatu negara hal-hal spesifik yang membutuhkan kearifan.”</p>
11 Mar 2011	Gunarta Adibrata	<p>“Penetapan keistimewaan DIY yang otomatis berarti kepala daerah ada di dalamnya. Tapi di luar itu juga tercakup berbagai keistimewaan lain.”</p> <p>“Not just argument, but also history. Tidak hanya berpendapat tapi mereka juga harus tahu landasan sejarah kenapa Yogyakarta itu istimewa.”</p> <p>“Yogya menjadi cerminan dari kestabilan Indonesia.”</p>
12 Mar 2011	Fika Taufiqurrohman	<p>“Pemilihan itu pada hakikatnya hanya mencari kandidat yang dikehendaki oleh masyarakat. Tapi yang terpenting dari hasil demokrasi itu sendiri adalah kebijakan yang diambil harus pro dengan rakyat. Oleh karena itu kalau rakyat DIY menghendaki adanya penetapan, alangkah baiknya apabila pemerintah pusat bisa mengakomodir.”</p> <p>“Sebagai generasi muda saya berharap seandainya penetapan tersebut bisa diwujudkan harus diimbani dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat DIY, jadi tidak sekadar keamanan atau kenyamanan. Hal itu penting karena perlahan-lahan perekonomian masyarakat DIY saat ini sudah mulai digeser oleh para pendatang.”</p>

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat

C. Deskripsi Media

Berikut deskripsi media tempat rubrik Aspirasi Keistimewaan diterbitkan. Berdasarkan data yang terdapat dalam arsip profil perusahaan yang diberikan pihak media dalam hal ini Primaswolo Sujono, deskripsi media objek penelitian dipaparkan sebagai berikut:

- Nama Surat Kabar : Kedaulatan Rakyat
- Jenis : Surat Kabar Harian
- Surat Ijin Penerbitan Pers :SIUPP
No.127/SK/MENPEN/A.7/1986
- Alamat Redaksi : Jalan Mangkubumi 40-42

Yogyakarta, 55232

- Hari Terbit : Senin-Minggu (setiap hari)
- Ukuran Halaman : 58 cm x 38 cm
- Jumlah Halaman : 24 Halaman
- Penerbit : PT-BP Kedaualatan Rakyat
Yogyakarta
- Direktur Utama : Drs HM Romli
- Direktur Keuangan : Imam Satriadi, SH
- Direktur Pemasaran : Fajar Kusumawardhani. SE
- Direktur Produksi : Sugeng Wibowo
- Direktur Litbang : H.M. Wirmon Samawi, SE, MIB
- Pemimpin Umum : Drs HM Romli
- Pemimpin Redaksi : Drs Octo Lampito Mpd
- Wakil Pemimpin Redaksi : Drs Ahmad Lutfhie MA
Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM
- Redaktur pelaksana : Musshada
Joko Budiarto
Drs. Hudono, SH
- Manajer Litbang Diklat Redaksi : Wismoko Poernomo
- Manajer Produksi Redaksi : Ngabdul Wakhid
- Sekretaris Redaksi : Dr. Hj Supriyatin
- Fotografer : Yuwono
Effy Widjono Putro

C.1 SKH Kedaulatan Rakyat

SKH Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar harian tertua di daerah Yogyakarta yang masih bertahan hingga saat ini. *KR* lahir pada pasca revolusi kemerdekaan RI, yaitu pada Kamis Kliwon 27 September 1945, tepat 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. *KR* memiliki izin terbit yakni SIUPP No. 127/SK/MENPEN/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. (Sumber: *Arsip Profil Perusahaan SKH Kedaulatan Rakyat*)

Surat kabar yang sekarang beralamat di Jalan Mangkubumi 40-42 Yogyakarta ini bermula dari sebuah koperasi, kemudian pada tahun 1950 berubah menjadi NV dan akhirnya berubah menjadi PT Badan Penerbitan Kedaulatan Rakyat sesuai dengan SK Menteri Kehakiman pada 7 Desember 1950.

Pendiri Kedaulatan Rakyat adalah H. Samawi (1913-1984). Dan para penerusnya, yaitu Dr. H. Soemadi M. Wonohito, SH dan Drs. M. Idham Samawi yang merawat dan melanjutkan perjuangan para pendiri *SKH Kedaulatan Rakyat*.

Nama Kedaulatan Rakyat dipilih oleh MR. Soedarisman Purwokoesoemo. Menurut Mr. Soedarisma Purwokoesoemo, *KR* merupakan koran pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka. Penerbitan perdana *KR* dimulai tanggal 27 September 1945 dengan mencetak sebanyak 2000 eksemplar dengan *headline* “Kekoesongan Pemerintah Daerah Jang Seloeroehnya di Tangan Bangsa Indonesia”. Namun sekarang tiras *KR* per harinya berjumlah sekitar 110.000 eksemplar. Logo *KR* pun masih dengan menggunakan huruf kapital tegak. Pada akhir tahun 1947 mulai menggunakan logo dengan huruf kursif dan ejaan lama.

Logo tersebut diciptakan dalam suasana perjuangan. Tahun 1972 disesuaikan dengan berlakunya ejaan yang disempurnakan (EYD).

Dalam dinamika perjuangan yang betitu itulah, *SKH Kedaulatan Rakyat* hadir sebagai penyaji informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. *KR* berusaha untuk tetap eksis. Selama tahun 1945-1948, *KR* tidak hanya bergulat dengan bangsa Indonesia, tapi juga dengan dirinya sendiri. Situasi yang ada, baik ekstern maupun intern menjadikan *KR* untuk sementara waktu mengalihkan perjuangan dari penyajian informasi berwujud koran yang hadir secara setia kepada pembaca ke pendukung perjuangan fisik bangsanya yang sedang berperang melawan penjajah dalam bentuk selebaran. Sejak tahun 1950 *KR* mengarah ke profesionalisasi usaha dengan upaya mencari keuntungan. Meskipun demikian, bukan berarti sifat perjuangannya ditinggalkan dan ditanggalkan.

Dinamika perkembangan *SKH Kedaulatan Rakyat* ini, telah bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga dalam perjalanannya, *KR* telah menerbitkan dua media baru yaitu Minggu Pagi dan Koran Merapi dalam naungan *Kedaulatan Rakyat Group*.

Berdasarkan motto *SKH Kedaulatan Rakyat* yaitu “Amanah Hati Nurani Rakyat”, menunjukkan bahwa *KR* membawa amanat rakyat yang mewakili suara hati nurani rakyat. Selain itu *KR* juga meningkatkan pengetahuan rakyat dengan menyampaikan informasi kepada rakyat. Kebijakan redaksional di *KR* adalah independen yang berarti tidak memihak kepada salah satu pihak. Disarankan bagi para wartawan dalam menuliskan berita mampu menonjolkan ketidakberpihakan atau mampu seimbang. Tidak dengan memihak pada salah satu narasumber saja.

Sampai Maret 2007, tiras surat kabar ini mencapai hampir 200.000 eksemplar per hari, dengan peredaran terluas di Yogyakarta yakni sekitar 160.000 eksemplar, Jawa Tengah 33.000 eksemplar, dan daerah lain sebanyak 17.000 eksemplar (*Sumber: Arsip Profil Perusahaan SKH Kedaulatan Rakyat*). Adapun deskripsi umum dari profil pembaca *SKH Kedaulatan Rakyat* sebagai berikut:

1. Dari sisi usia dibaca oleh pembaca yang berusia antara 20-46 tahun, dengan komposisi terbesar pada rentang usia 21-25 tahun sebanyak 33% dan 31-40 tahun sebanyak 30%.
2. Dari sisi tingkat pendidikan, dibaca oleh pembaca dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 44%, Sarjana 37%, dan Diploma 13%.
3. Berdasarkan pekerjaan, didominasi secara merata oleh pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, dan para pengusaha.

C.2 Visi *SKH Kedaulatan Rakyat*

Perjuangan *SKH Kedaulatan Rakyat* dalam mempertahankan amanat dan suara hati nurani rakyat tak hanya melalui sebuah media dengan menyebarkan lembaran-lembaran berita ke seluruh penjuru daerah, tetapi bentuk perjuangan itu juga melalui usaha untuk menciptakan kedekatan dengan rakyat bawah. *KR* berjuang membawa aspirasi dan menyentuh kebutuhan lapisan bawah sehingga melahirkan komitmen dan kepercayaan yang kuat.

Menyebarkan informasi yang benar dan berimbang dengan cepat memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Untuk menjadi berguna (*Migunaning Tumparing Liyan*), membangun bersama (*Bebarengan Mrantasi Gawe*), dan

membawa terang bagi kehidupan (*Urip Sejatine Gawe Urup*) sehingga *KR* hidup di dalam realits sosial mereka, adalah suatu perjuangan yang berat. Dikawal oleh armada yang handal, *KR* berusaha menjadi tolak ukur dan sumber inspirasi bagi hidup dan perjuangan rakyat. *KR* lahir sebagai hasil perjuangan rakyat yang diteruskan sampai kapan pun juga.

C.3 Misi *SKH Kedaulatan Rakyat*

Menyajikan informasi yang aktual bukanlah hal mudah di saat ini, maka dari itu *SKH Kedaulatan Rakyat* berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Untuk memenuhi selera para pembacanya, *KR* berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dicerna oleh para pembacanya karena *KR* menyadari bahwa pembacanya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya.